20 Catin Ikuti Bimbingan Perkawinan

LENDAH (KR) - Pernikahan adalah ibadah terpanjang yang tujuannya untuk membentuk rumah tangga harmonis dengan komitmen seumur hidup. Calon pengantin (Catin) harus benar-benar mempersiapkan segala hal terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah, baik kesiapan mental, fisik dan finansial, hingga mengikuti bimbingan pernikahan.

KR-Asrul Sani

Mufti Amri SHI (berdiri) membekali sejumlah pasangan catin yang mengikuti bimbingan pranikah.

Demikian disampaikan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (PAI KUA) Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo, Mufti Amri SHI saat bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) bekerjasama Puskesmas Lendah I di Ruang Balai Nikah KUA Lendah, belum lama ini.

Bimbingan pranikah yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Urais Kanwil Kemenag DIY H Jauhar Mustofa SAg, MSi diikuti 10 pasang calon pengantin (catin). Bimbingan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu catin membangun pondasi yang kokoh baik dari segi agama, sosial, ekonomi hingga kesehatan dalam membina keluarga sakinah.

Materi bimbingan perkawinan sebagai bekal calon pengantin, meliputi membangun keluarga sakinah, psikologi keluarga dan dinamika pernikahan, menjaga kesehatan reproduksi keluarga serta menyiapkan generasi berkualitas.

Mufti dalam materi Psikologi dan Dinamika Pernikahan serta Membangun Keluarga Sakinah, mengatakan sepasang pengantin yang akan menjalani kehidupan baru, mampu mengelola dan me*manage* rumah tangga sesuai kesepakatan, membangun komitmen dan komunikasi antaranggota keluarga, mengembangan potensi keluarga, bisa menyusun strategi mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga dalam penyelesaian masalah tak menimbulkan masalah baru, masing-masing mampu bertanggungjawab atas anggota keluarga yang memiliki internalisasi dan eksternalisasi nilai dan norma-norma positif.

(Rul)

DINILAI SUDAH MAMPU

30 Ribu Warga Dicoret DTKS

WONOSARI (KR) - Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul mencoret data warga yang tidak layak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak akhir 2022 hingga hingga Agustus 2023 ini.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data terdapat 30 ribu warga lebih dicoret dari DTKS karena dinilai sudah mampu.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul, Giyanto, mengatakan bahwa hasil pemutakhiran data DTKS oleh Kementerian Sosial diketahui bahwa DTKS berkurang cukup signifikan.

"Sebelum adanya pemutakhiran data, DTKS di Gunungkidul mencapai sekitar 611 ribu jiwa. Namun setelah dilakukan pemutakhiran, warga yang masuk DTKS saat ini sebanyak 572 ribu jiwa, Selasa (12/9)..

Diakuinya data tersebut bersifat dinamis, setiap bulan selalu diperbarui dan hingga pertengahan Agustus kemarin tercatat sebanyak 572.898 anggota rumah tangga masuk dalam DTKS. Untuk angka DTKS di Gunungkidul tertinggi tercatat pada 14 September 2022 lalu mencapai 611.522 jiwa. Karena pada saat itu masih banyak warga yang berstatus perangkat desa, TNI, Polri, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam DTKS. Namun senjak adanya aturan baru terhadap kualifikasi DTKS, jumlah DTKS di Gunungkidul mengalami penurunan.

"Sekarang kalau di suatu keluarga ada yang mendapatkan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) otomatis semua anggota rumah tangganya dikeluarkan dari DTKS," imbuhnya.

Dengan demikian, menurutnya DTKS di Gunungkidul setiap bulan akan terus menurun karena adanya pembaruan dalam kualifikasi tersebut. Pemutakhiran data serupa akan dilakukan rutin setiap bulann untuk meminimalkan risiko bantuan salah sasaran di masyarakat. Kewenangan verifikasi dan validasi setiap bulan dilakukan oleh kalurahan, misalnya ada warga yang meninggal atau pindah atau justru ada yang sudah mampu.

"Sedangkan verivikasi dan pengesahan, penghapusan dilakukan Kementerian Sosial yang datanya dikoordinasikan dengan lintas sektor seperti BPJS maupun Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

(Bmp)

ANUGERAH KEBUDAYAAN BUPATI

Apresiasi Penggiat Budaya

WONOSARI (KR) - Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kiprah dan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan akan memberikan apresiasi kepada para penggiat dan tokoh masyarakat di bidang kebudayaan. Pemkab Gunungkidul melalui Disbud telah melakukan berbagai upaya dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan baik yang terkait dengan penyediaan regulasi, pelestarian cagar budaya, maupun penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. "Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul merupakan penghargaan yang diberikan oleh bupati kepada para seniman dan budayawan yang telah berkiprah di bidang kebudayaan," kata Kepala Disbud Gunungkidul Agus Mantara MM, Selasa (12/9).

Diungkapkan, bidang yang dimaksud meliputi pelestari dan/atau pelaku seni, pelestari dan/atau pelaku adat tradisi, pelestari dan/atau pelaku cagar budaya, budayawan, kreator, Mpu, dan kategori lain terkait regenerasi pelestari dan atau pelaku budaya. Penghargaan ini sebagai pendorong untuk menumbuhkembangkan motivasi berkarya , sehingga tujuan peningkatan produktifitas dalam bidang kebudayaan semakin besar. " Tahapan sudah dilakukan pengumuman mulai , Jumat (25/8) hingga Rabu (20/9). Sedangkan pendaftaran berkas usulan calon penerima anugerah, Sabtu (26/8) sampai Senin (25/9). Selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan. Sidang penentuan dan pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Bupati Gunungkidul pada, Jumat (10/11) mendatang," jelasnya.

(Ded)

TERKENDALA BANYAK WP DI LUAR DAERAH

BKAD Berhasil Tarik Tunggakan Pajak Rp 1,3 Miliar

WONOSARI(KR)- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul terus mengoptimalsasi penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sampai Akhir Agustus 2023 tunggakan yang tertagih sebesar Rp 1.302.567.99,- Jumlah tersebut masih jauh dari ditunggakan yang harus ditarik dari 1995 sebesar Rp 21 miliar. Kendalannya, banyak Wajib Pajak (WP) yang tinggal di luar daerah sehingga menghambat penyampaian Surat Pemberitauan Pajak Terhutang (SPPT) kepada yang bersangkutan.

KR-Endar Widodo

Putro Sapto MT

"Tetapi hambatan tersebut terus diusahakan agar SPPT pada wajib pajak sampai dan dapat segera membayar pajak yang terhutang," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul Putro Sapto Wahyono SIP MT didampingi Kabid Penagihan Eli Martono SIP MPP MEng, Selasa (12/9).

Usaha penagihan tunggakan pajak terus dilakukan dengan melakukan kegiatan intensifikasi, klarifikasi dan penyisiran langsung kepada wajib pajak, dengan menerapkan penagihan melalui jemput bola pembayaran PBB-P2 ke padukuhan. Di samping untuk juga dilakukan pembetulan atau perbaikan data secara bertahap agar tidak muncul lagi SPPT dobel dan tidak ada obyek yang telah menjadi fasilitas umum.

Selain itu pemerintah menerapkan pembebasan denda administrasi PBB-P2. berlaku 6-30 september 2023. Tunggakan PBB-P2 sebanyak Rp 21 miliar ini juga mendapatkan antensi dari DPRD Gunungkidul.

Ketua DPRD Endah Subekti Kutariningsih SE akan menjembatani jika dalam penagihan di lapangan timbul masalah.

" Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) perlu berinovasi untuk menarik piutang pajak tersebut agar cepat berhasil tetapi tidak memberatkan masyarakat," kata Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE.

(Ewi)

Brimob Polda DIY Salurkan Bantuan Air Bersih

WONOSARI (KR) -Satuan Brimob Polda DIY, dipimmpin Kombes Pol Imam Suhadi SIK, Selasa (12/9) melakukan bhakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih di Salakan, Semoyo Pathuk Gunungkidul dan Desa Troyan 1 dan Troyan 2 Tepus Gunungkidul. Rombongan Satuan Brimob Polda DIY disambut Kapolsek Pathuk AKP Amir Mahmud SIKom dan Kepala Desa Semoyo Sudari. Total bantuna yang diberikan kepada warga Kabupaten Gunungkidul 250.000 air bersih. Bhakti sosial atas arahan Dankor Brimob Polri dan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH. Jumlah tersebut dibagi di beberapa tempat, terutama yang terdampak kekeringan.

KR-Istimewa

Warga antusias menyambut Satuan Brimob Polda DIY menyalurkan bantuan air bersih.

Kombes Pol Imam Suhadi SIK, menyampaikan bantuan air bersih dimaksudkan untukm memebantu warga Gunungkidul yang saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk kepentingan sehari-hari. Air bersih disalurkan menggunakan kendaraan taktis (rantis) water canon dan water treatment. "Bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepeduliaan kepolisian terhadap apa yang dialami warga di musim kemarau yang mengalami kekeringan," tandas Imam Suhadi.

Selain memberikan bantuan air bersih, Imam Suhadi juga melakukan dialog dengan warga mengenai harapannya kepada institusi kepolisian. Diharapkan jika warga menghadapi kesulitan bersedia menyampaikan kepada kepolisian, dan kepolisian tentu akan segera menindaklanjuti kaporan tersebut. Seperti halnya kali ini, warga sangat membutuhkanb bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pihak Satbrimob Polda DIY segera meresponsnya dengan memberikan bantuan air bersih.

(Hrd)

POLRES - PEMKAB KULONPROGO TANDATANGAN KERJA SAMA

Masyarakat Butuh Penanganan Cepat Kasus Tipikor

WATES (KR) - Guna mewujudkan penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, Polres Kulonprogo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menjalin kerja sama.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dilakukan Kapolres AKBP Nunuk Setyowati MH dan Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti MT di Ruang Rapat Sanika Satyawada Polres Kulonprogo, Selasa (12/9).

Menurut Kapolres AKBP Nunuk Setyowati SIK penanganan tipikor antara polres dan pemkab sebenarnya sudah terjalin lama, tapi memang belum ada kesepakatan tertulis mengenai optimalisasi kinerja penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Sebenarnya sudah berlangsung lama dan untuk kurun waktu yang cukup lama, tapi secara hitam putih belum ada kerja sama yang pernah dibuat. Sehingga penandatanganan kesepakatan ini merupakan inovasi dalam mewujudkan kerja sama," kata Nunuk.

Dalam kerja sama akan mengedepankan audit internal dari pemkab terlebih dahulu melalui peran Inspektorat Daerah untuk memastikan ada tidaknya unsur tipikor dalam setiap auditnya. "Penandatanganan Kerja Sama (PKS) lebih pada bagaimana ketika Polres Kulonprogo akan menanganani tindak pidana korupsi yang dikedepankan adalah perannya Inspektorat Daerah (Irda), jadi nanti dari Irda melaksanakan audit investigasi terlebih dahulu," jelas Nunuk.

KR-Asrul Sani

Pj Bupati Kulonprogo Ni Made dan Kapolres AKBP Nunuk menunjukkan perjanjian kerja sama yang mereka tandatangani.

Kendati kasus tipikor di Kulonprogo termasuk rendah ungkapnya, tapi kerja sama diharapkan tetap terjalin dengan baik dan ditingkatkan.

Sementara itu Pj. Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengapresiasi dan mendukung kerja sama yang mereka tandatangani.

Dirinya berharap kerja sama sebuah kemajuan besar terhadap upaya pencegahan dan penanganan tipikor di Pemkab Kulonprogo untuk menghindari risiko kerugian keuangan negara dan berdampak positif pada optimalisasi pelayanan pada masyarakat. "Ini akan menjadi titik tolak kedepan kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, masyarakat butuh kepastian dan penanganan yang cepat dan tepat," tegas Ni Made.

(Rul)

PERBAIKAN KANTOR KALURAHAN BEDOYO

Ketua Yayasan GPC Serahkan Bantuan Keramik

KR-Dedy EW

Syarief Guska Laksana menyerahkan bantuan keramik.

WONOSARI (KR) - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Drs HM Gandung Pardiman MM membantu perbaikan Kantor Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong. Bantuan keramik diserahkan diwakili Ketua Yayasan Gandung Pardiman Center (GPC) Syarief Guska Laksana SH dan diterima Lurah Bedoyo Sulardi, Senin (11/9). "Harapannya bantuan keramik ini bisa membantu perbaikan Kantor Kalurahan Bedoyo. Sehingga nantinya mampu untuk mendorong peningkatan layanan kepada Masyarakat," kata Ketua Yayasan GPC Syarief Guska Laksana SH.

Selain itu, Syarif Guska juga menyerahkan bantuan Rp 4 juta untuk pemasangan keramik. Kedatangan rombongan bersama Ketua Pimpinan Kapanewon (PK) Golkar Ponjong Supriyono disambut Lurah Bedoyo Sulardi dan perangkat. Dalam kesempatan tersebut Lurah Bedoyo Sulardi menyampaikan terimakasih atas bantuan dari Drs HM Gandung Pardiman MM yang diserahkan Ketua Yayasan GPC Syarief Guska Laksana. Bantuan ini tentunya sangat bermanfaat akan akan dipergunakan untuk meningkatkan Pembangunan Kantor Kalurahan Bedoyo. Sehingga tentu akan mampu mendorong peningkatan layanan kepada Masyarakat.

(Ded)

UNTUK KEDUA KALINYA

Gunungsewu Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

WONOSARI (KR) - Kabupaten Gunungkidul kembali mempertahankan Kawasan Karst Gunungsewu dalam status UNESCO Global Geopark untuk kedua kalinya sejak ditetapkan di 2015 lalu. Sekretaris Geopark Gunungsewu, Hary Sukmono mengatakan, sudah mendapatkan hasil dari revalidasi Geopark Gunungsewu dalam konferensi UNESCO Global Geopark yang berlangsung di Maroko dan kembali mendapatkan predikat green card. "Kepastian ini diumumkan dalam Konferensi MíGoun UNESCO Global Geopark di Maroko pada Minggu 10 September 2023 lalu," katanya Selasa (12/9).

Berdasarkan hasil tersebut kawasan karst yang membentang dari Gunungkidul, Wonogiri hingga Pacitan berhasil mempertahankan status sebagai anggota UNESCO Global Geopark untuk kedua kalinya sejak ditetapkan di 2015 lalu. Keberhasilan tersebut selain Geopark Gunungsewu, untuk wakil Indonesia ada Kaldera Toba. Namun dari sisi hasil hanya Gunungsewu yang mendapatkan status green card. Terdapat 39 geopark yang dinilai ulang dan hasilnya sebanyak 29 geopark mendapatkan status green card dan lima lainnya mendapatkan yellow card. Untuk Toba mendapatka status kuning [yellow card] dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki selama dua tahun.

"Jika kesempatan tidak dilakukan maka maka status keanggotaan UNESCO Global Geopark akan dicabut," ujarnya.

Keberhasilan mempertahankan status jaringan geopark dunia memang sudah diprediksi sebelum penilaian ulang dilakukan dan sebelum penilaian pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan dengan Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Sehingga ada pravalidasi dari KNGI sehingga saat tim UNESCO datang, sudah benar-benar siap didalam penilaian.

"Kami bersyukur status global geopark dapat dipertahankan kembali dengan memperoleh predikat green card," ujarnya.

Terpisah Kepala Seksi Promosi Wisata, Dinas Pariwisata Gunungkidul, Sofyan Dwi Aryanto menambahkan bahwa konferensi UGG ke sepuluh bertajuk Mígoun UNESCO Global Geopark di Maroko dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Pacitan, Jawa Timur. Saat revalidasi di Gunungkidul berlangsung dua hari di empat lokasi.

Pada Jumat (28/7) di geosite Wediombo di Kalurahan Jepitu, Girisubo. dilanjutkan Sabtu (29/7) di geosite Kalisuci, Pacarejo, Semanu dan ke Geopark Corner di SMP Negeri 1 Wonosari.

"Saat penilaian ditutup di geosite Nglanggeran di Kapanewon Patuk, Gunungkidul," ujarnya.

(Bmp)